

Aktivitas Gerombolan DI/TII dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Sidrap 1950-1965

Eka Wulandari¹, Jumadi², La Malihu³

Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNM

Email: 'wulannur98@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai gerakan DI/TII Abdul Qahhar Mudzakkar yang memilih mendirikan NII di Kabupaten Sidrap. Dalam penelitian ini fokus membahas apa yang menjadi latar belakang sehingga lahir gerakan DI/TII beserta aktivitas gerombolan DI/TII 1950-1965 dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat Sidrap pada kurung waktu 1950-1965. Penelitian ini menemukan bahwa karena adanya faktor geografis antara Kabupaten Sidrap dengan Kabupaten Wajo sebagai daerah operasi dari gerombolan DI/TII yang menjadi alasan gerakan DI/TII melakukan aktivitasnya seperti merusak jembatan, jalan, pemutusan kawat telepon, penebangan pohon dan menculik anggota yang aktif dalam pemerintahan. DI/TII dalam kurung waktu 1950-1965 memberikan dampak yang cukup nyata dirasakan oleh penganut kepercayaan Tolotang. Aktivitas gerombolan yang ingin menjadikan syariat islam sebagai dasar gerakannya, menghadapkan kelompok Tolotang berada pada situasi yang sulit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan tahapan, yakni heuristik (pengumpulan data), kritik (verifikasi), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah).

Kata Kunci: DI/TII, Sidrap dan Gerombolan

Abstract

This study discusses the DI / TII Abdul Qahhar Mudzakkar movement which chose to establish NII in Sidrap Regency. In this study the focus is to discuss what is the background so that the DI / TII movement was born along with the activities of the DI / TII gang 1950-1965 and how it impacts on the people of Sidrap in the 1950-1965 time frame. This study found that due to geographical factors between Sidrap Regency and Wajo District as the operational areas of the DI / TII gangs which became the reason for the DI / TII movement to carry out activities such as damaging bridges, roads, terminating telephone lines, cutting down trees and abducting active members of government. . DI / TII in the 1950-1965 time frame had a significant impact felt by Tolotang followers. The activities of the group who wanted to make Islamic Sharia the basis of their movements, put the Tolotang group in a difficult situation. This study uses historical research methods with stages, namely heuristics (data collection), criticism (verification), interpretation (interpretation), and historiography (history writing).

Keyword: DI/TII, Sidrap and the horde

A. Pendahuluan

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, seperti masalah ekonomi, sosial, hubungan luar negeri, maupun masalah pertahanan keamanan. Khusus

dibidang pertahanan keamanan, muncul berbagai pemberontakan yang menentang pemerintah RI yang sah. Salah satu pemberontakan adalah DI/TII (Darul Islam/Tentara Indonesia) Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, dengan pasukannya yang

diberi nama Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan Darul Islam didirikan Sekarmaji Maridjan Kartosoewiryo pada tanggal 7 Agustus 1949 di Jawa Barat. Gerakan DI/TII kemudian meluas dan mempengaruhi daerah-daerah, salah satunya Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Abdul Qahar Mudzakkar (1950-1965).

Tampilnya Abdul Qahhar Mudzakkar sebagai salah seorang tokoh utama para pejuang dalam periode Perang Kemerdekaan (1945-1949), di kemudian hari justru memberikan kemungkinan terjadinya berbagai hal yang menyangkut usaha penyelesaian masalah gerilya di Sulawesi Selatan. Di dalam perkembangannya kemudian, muncul masalah akibat sikap dan tindakan bekas pejuang kemerdekaan ini menjadi rumit dan melahirkan gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Abdul Qahhar Mudzakkar. (Anhar Gonggong, 2004)

Inti kekuatan DI/TII di Sulawesi Selatan ialah mereka yang pernah ikut membela dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan tegaknya RI dalam periode Perang Kemerdekaan (1945-1949). Pada mulanya, mereka mengharapkan akan menjadi anggota APRIS didalam suatu kesatuan organisasi ketentaraan tingkat Brigade . Pasca pengakuan kemerdekaan dan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang bersifat federal, Desember 1949, telah timbul ketegangan di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar, bekas ibu kota Negara Indonesia Timur (NIT) terdapat pertentangan antara kaum federal dan pendukung negara Kesatuan SKonniklijke Nederlands Leger (KNIL) dan TNI dan kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan (KGSS), bekas gerilyawan menuntut agar mereka digabungkan dalam tentara nasional, namun panglima Tentara Indonesia Timur, Tentara Territorium VII (T.T. VII) Alex Kawilarang hanya bersedia menerima sejumlah gerilyawan yang lulus seleksi. (C Van Dijk, 1983)

Salihuddin (2012) dalam penelitiannya Gerakan Gerombolan Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat Tanru

Tedong (1953-1960) menjelaskan bahwa munculnya gerombolan berasal dari persoalan penyelesaian masalah gerilya. Gerakan gerombolan di Tanru Tedong muncul setelah pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang dipimpin oleh Hamid Aly dan Usman Balo terpisah dari gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Abdul Qahhar Mudzakkar. Pada penelitian ini masih kurang yang membahas secara spesifik tentang gerakan DI/TII di seluruh daerah Sidrap, sehingga peneliti mencoba melahirkan karya ilmiah yang spesifik membahas hal tersebut dengan penelitian DI/TII di Sidrap dengan kurun waktu 1950-1965.

Kemudian pada bulan juli 1950, Abdul Qahhar Muzakkar bertemu dengan Kawilarang. Atas nama kaum gerilyawan ia mengajukan permohonan agar mereka dijadikan Brigade atau Resimen Hasanuddin dari TNI, dengan ia sendiri sebagai komandan. Permohonan ini ditolak, kemudian Abdul Qahhar Muzakkar memutuskan hubungannya dengan TNI.

Pada 7 Agustus 1953 gagalnya perundingan Abdul Qahar Mudzakkar dengan pihak pemerintah membuat Abdul Qahar Mudzakkar menyatakan diri bergabung dengan gerakan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo dengan menjadi bagian NII, gagalnya perundingan yang dilakukan Abdul Qahar Mudzakkar dengan pihak pemerintah karena anggota KGSS tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi TNI, karena faktor tingkat pendidikan, latar belakang ketentaraan, karena tidak diakuinya kelaskaran yang dipimpinnya, oleh pemerintah, meskipun mereka juga berjuang mempertahankan proklamasi.

Sejak saat itu Sulawesi Selatan menjadi basis terkuat pertahanan DI/TII yang menyatakan diri bergabung dengan NII pada tahun 1953 dan menyebar ke seluruh wilayah di Sulawesi Selatan termasuk Sidrap yang menjadi salah satu tempat pemberontakan oleh gerombolan DI/TII. Dalam perkembangan selanjutnya, menimbulkan penderitaan dan penindasan

terhadap rakyat. Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada rakyat seringkali menjadi sumber penderitaan dan kekejian yang semena-mena. Di pedalaman, tempat desa-desa diserbu, dalam beberapa daerah sangat sering barang-barang dan hasil panen dirampas, jembatan dan lumbung padi dibakar atau dimusnahkan. Tidak sedikit penderitaan yang ditanggung rakyat Sidrap khususnya, karena gerakan ini melakukan terror terhadap masyarakat Sidrap.

Bertolak dari alasan tersebut, maka penulis mencoba untuk merekonstruksi gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan di kawasan wilayah Sidrap dengan dua pertimbangan. Pertama, bahwa masih jarang ditemui penulisan tentang DI/TII khususnya di Sidrap, padahal daerah tersebut termasuk konsentrasi pasukan DI/TII, dalam pergerakan mereka melakukan kegiatan kesuatu wilayah ke wilayah lain. Kedua, secara geografis letak Kabupaten Sidrap sangat strategis karena berbatasan dengan sebelah utara Kabupaten Pinrang, sebelah timur Kabupaten Luwu dan Wajo, sebelah Selatan Kabupaten Barru dan Soppeng, dan Sebelah Barat Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-Pare .

B. Metode Penelitian

Setiap ilmu mempunyai metode. Tanpa metode, kumpulan pengetahuan tentang objek tertentu tidak dapat dikatakan sebagai ilmu, sekalipun masih ada syarat lain. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yakni *methodos* yang berarti cara atau jalan. Dalam kaidah ilmiah, metode berkaitan dengan cara kerja atau prosedur untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode sejarah dapat diartikan sebagai cara atau prosedur yang sistematis dalam merekonstruksi masa lampau. Metode sejarah bertujuan memastikan dan mengatakan kembali fakta masa lampau. Metode yang sering digunakan dalam ilmu sejarah dan ilmu sosial lainnya adalah metode kuantitatif dengan tujuan menemukan suatu hal yang unik dan

mampu mengungkapkan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. (M. Saleh Madjid dan Abd. Rahman Hamid, 2008) Metode sejarah merupakan cara atau teknik dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau. Penelitian sejarah mempunyai empat tahap, yaitu (1) pengumpulan sumber, (2) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (3) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (4). penulisan sejarah (historiografi). (Kuntowijoyo, 2005)

a. Heuristik

Semua jenis tulisan atau penelitian tentang sejarah menempatkan sumber sejarah sebagai syarat mutlak yang harus ada. Tanpa sumber sejarah, tidak dapat direkonstruksi oleh sejarawan. Tanpa sumber sejarah, kisah masa lalu tidak dapat direkonstruksi oleh sejarawan. Sebelum menentukan teknik pengumpulan sejarah, pertama-tama yang perlu dipahami adalah bentuk dari sumber sejarah yang akan dikumpulkan. Sumber sejarah dibedakan atas sumber tulisan, lisan dan benda.

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan sumber dengan menempuh tiga cara : (1). Penelitian Arsip. Arsip ini penulis peroleh dari lembaga-lembaga khusus yang menangani dan menghimpun Arsip atau koleksi pribadi seseorang seperti Balai Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan, (2) Penelitian Pustaka yang sumbernya berupa karya tulis ilmiah dan buku koleksi pribadi penulis, (3) Penelitian Lapangan. Dengan mengumpulkan data menggunakan sumber lisan melalui wawancara di lapangan terkait judul yang dikaji. Metode wawancara dilakukan dengan cara wawancara kepada saksi mata aktivitas DI/TII, juga kepada istri pimpinan TKR Usman Balo serta kepada anggota TNI yang aktif pada masa DI/TII.

b. Kritik.

Setelah sumber dikumpulkan, tahap selanjutnya ialah kritik sumber untuk menentukan otentitas dan kredibilitas sumber sejarah. Semua sumber yang telah dikumpulkan terlebih dahulu verifikasi sebelum digunakan. Hasil pengerjaan studi

sejarah yang akademis atau kritis memerlukan fakta-fakta yang teruji. Oleh karena itu, data-data yang diperoleh melalui tahapan-tahapan heuristik terlebih dahulu harus dikritik atau disaring sehingga diperoleh fakta-fakta yang seobjektif mungkin.

c. Interpretasi.

Tahapan ini merupakan langkah setelah kritik sumber. Sebelum sampai pada Historiografi, terlebih dahulu fakta sejarah tersebut digabung-gabungkan (disintesis) berdasarkan pada subjek kajian. Interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut juga dengan analisis sejarah. Dudung Abdurrahman (1999) berpendapat Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan.

d. Historiografi

Historiografi merupakan puncak dari segala-galanya dalam metode penelitian sejarah. Pada fase ini penelliti mencoba menangkap dan memahami sejarah bagaimana terjadinya. Dalam konteks ini, penulisan tidak hanya sebatas menjawab pertanyaan-pertanyaan elemeter atau deskriptip mengenai “apa”, “siapa”, “kapan” dan “bagaimana” suatu peristiwa terjadi, melainkan suatu eksplanasi secara kritis dan mendalam tentang “bagaimana” dan “mengapa” atau sebab musabab terjadinya suatu peristiwa. (Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, 2015)

C. Tinjauan Penelitian

Letak Kabupaten Sidenreng Rappang berada di tengah-tengah provinsi Sulawesi Selatan, letaknya pada sebelah utara Kota Ujung Pandang ± 190 km dan ± 33 km sebelah timur daerah pelabuhan Pare-Pare atau sebagai pusat pengembangan untuk wilayah tengah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kabupaten Sidrap berada di sebelah utara Kota Makassar, tepatnya berada di antara titik kordinat 3°43-4°09 Lintang Selatan dan 119°41-120°10 Bujur Timur. Posisi Kabupaten Sidrap ini sangat strategis sebab berada di persimpangan

jalur lalu lintas dari arah Barat Selatan, Timur hingga Utara semuanya terhubung dengan kabupaten lain (Aris Asnawi dan Usman Nukma, 2016). Dengan ketinggian antara 10 m - 1500 m dari permukaan air laut dengan batas-batas wilayah antara lain sebelah Timur dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu, sebelah Selatan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Barru, sebelah Barat dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Pinrang, dan sebelah Utara dengan Kabupaten Enrekang. Dalam lapangan pekerjaan masyarakat Sidrap lebih banyak berprofesi sebagai petani, hal ini disebabkan kondisi alam yang memang berada di bidang agraris

Secara keseluruhan luas Kabupaten Sidrap berkisar 1.883,25 km² yang terbagi dalam 11 kecamatan dan 106 desa/kelurahan (Yasser Latief, 2006). Kabupaten Sidrap pada masa pembentukannya memiliki 7 Kecamatan diantaranya Kecamatan MaritenggaE, Panca Lautang, Baranti, Watang Pulu, Dua Pitue, Tellu LimpoE, Panca Rijang. Namun seiring dengan berjalannya waktu, dengan melihat efektifitas pemerintah sehingga pada tahun 2000 Kabupaten Sidrap memiliki 11 Kecamatan dengan hasil pemekaran yaitu Kecamatan Baranti, Kecamatan Pancarijang, Kecamatan Pancalautang, Kecamatan Tellu LimpoE, Kecamatan Maritenggae, Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Kulo, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Pitu Riawa, Kecamatan sidenreng, dan Kecamatan Pitu Riase.

Masyarakat Sidenreng Rappang mayoritas memeluk agama Islam. Hingga saat ini tetap menempatkan Islam sebagai landasan kehidupan Spritualnya. Sekitar 80% memeluk agama turun temurun yakni Islam. Selain itu juga ada penganut kepercayaan Towani Tolotang yang kemudian menjadi agama Hindu Towani. Komunitas Towani Tolotang dipimpin oleh seorang pemimpin tertinggi yang disebut “Uwatta dan uwa-uwa” yang memimpin kelompok-kelompok kecil di bawahnya. Uwa dalam komunitas Towani Tolotang

merupakan symbol dalam pengambilan keputusan tertinggi pada Komunitas Tolotang yaitu memiliki pandangan bagi keyakinan masyarakat tentang tujuan hidup bersama, artinya Uwa dalam segala pengambilan keputusan merupakan representasi dari kelompok masyarakat Towani Tolotang. Namun, pada kenyataannya keputusan itu hanya berada pada aspek religious. (Alfiansyah *et al*, 2018)

D. Pembahasan

1. Latar Belakang DI/TII Di Sidrap 1950-1965

a. Awal Masuknya DI/TII di Sidrap di Sidrap (1950)

Pada mulanya, setelah Perang Kemerdekaan berakhir, mereka yang ikut membela dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan tegaknya RI mengharapkan akan menjadi anggota APRIS. Di dalam satu kesatuan organisasi ketentaraan tingkan Brigade. Mereka menuntut diresmikan secara utuh, keseluruhan dalam satu kesatuan, Brigade Hasanuddin. Tetapi tuntutan mereka ditolak. Kahar Mudzakkar beserta beberapa pimpinan bawahannya mengambil jalan perlawanan terhadap pemerintah RI. Hal itu dilakukan dengan cara membentuk gerakan, yang dalam proses prosesnya dikenal dengan gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan.

Ketika kelompok kecil gerilyawan menyerah pada bulan Juli dan menyatakan harapan untuk masuk tentara, mereka di tolak. Lagi-lagi di bentuk lima Batalyon yang kadang disebut Brigade. Diantaranya, Batalyon Latimojong yang dipimpin Hamid Aly dan Usman Balo sebagai pemimpin kedua yang bergerak sekitar Enrekang dan Parepare. Batalyon Batu Putih yang dipimpin oleh Andi Tenri Ajeng bergerak antara Palopo dan Siwa, Batalyon Lereng Cinta yang dipimpin Bahar Mattaliu dan bergerak di Soppeng, Batalyon Rante Mario yang dipimpin Sanusi Daris dan bergerak di Enrekang, Batalyon 40.000 yang dipimpin Syamsul Bachri bergerak di Wajo. (C Van Dijk, 1983)

Untuk mereorganisasi kembali pasukannya, Abdul Qahhar Muzakkar mengumpulkan kembali anak buahnya untuk mengadakan Pertemuan di Bajo, sekitar 15 km dari arah barat Belopa. Tujuan diadakannya pertemuan tersebut adalah untuk menyatukan kembali pasukan dalam satu kesatuan. Abdul Qahhar Muzakkar berhasil mengumpulkan 40.000 pasukan yang berasal dari Palopo, Wajo, Bone, Sidenreng Rappang, Enrekang, Pinrang. Dari pertemuan itu, Abdul Qahhar Muzakkar mengungkapkan menginginkan agar pasukan 40.000 yang terkumpul menjadi divisi TII 40.000. Hamid Aly dan Usman Balo yang membawahi Brigade Latimojong tidak menyetujui pembentukan divisi TII tersebut. Akan tetapi, karena rasa hormat pada Abdul Qahhar Muzakkar selaku pimpinan mereka pun setuju tapi dengan syarat agar Brigade Latimojong tetap dipertahankan sebagai TKR. Akhirnya pasukan-pasukan yang terkumpul tadi dibagi menjadi dua wilayah operasi, yaitu; 1. TII yang dipimpin oleh Kahhar Mudzakkar beroperasi di wilayah Bone, Wajo dan Palopo; 2. TKR yang dipimpin oleh Hamid Aly dan Usman Balo beroperasi di wilayah Sidenreng Rappang, Parepare, Pinrang dan Enrekang. (Salihuddin, 2012)

Pada akhir Agustus 1952, TKR akhirnya memisahkan diri dengan Abdul Qahhar Muzakkar. Abdul Qahhar Muzakkar menuding Usman Balo telah mengkhianati cita-cita perjuangan gerilya, sebaliknya Usman Balo justru menuding bahwa Abdul Qahhar Muzakkar telah mengkhianati cita-cita perjuangan. (Abd. Rahman Hamid, 2008)

Pada tanggal 7 Agustus 1953, Abdul Qahhar Muzakkar memproklamasikan berdirinya Negara Republik Islam Indonesia dan menyatakan bahwa daerah Sulawesi dan daerah sekitarnya menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia.

b. Perkembangan DI/TII di Sidrap (1950-1965)

Dalam perkembangannya, gerakan pimpinan Abdul Qahhar Muzakkar telah

melangkah untuk memperkuat dirinya dengan mengadakan reorganisasi pasukan-pasukannya. Dalam rangka ini pihak gerilya telah mengumumkan gerakannya dari CTN menjadi Tentara Keamanan Rakyat Komando Pasukan Hasanuddin pada tanggal 24 Maret 1952. Gerakan ini lebih dikenal dengan nama TKR.

Pada November 1952, terjadi pertempuran antara Batalyon 719 dan Batalyon 711. Pertempuran terjadi di dekat Pare-Pare dan Enrekang, suatu kawan yang situasi militernya telah menjadi sangat ruwet. Batalyon 711, tadinya adalah Batalyon Abdullah yang merupakan salah satu dari satuan-satuan pertama TNI yang mendarat di Sulawesi Selatan dengan pasukan ekspidisi dalam tahun 1950. Yang sekembalinya dari gerakan militer penumpas RMS di Maluku pada bulan Mei pada 1952 lalu bermarkas di Rappang. Batalyon 719 dengan Komanda Andi Selle (bekas Batalyon KGSS/CTN "Bau Masepe") bermarkas di Pinrang.

Di kawasan dekat Enrekang terdapat Brigade TKR Latimojong di bawah pimpinan Hamid Aly dan Usman Balo. Usman Balo telah memisahkan diri dengan Andi Selle ketika Andi Selle diremikan statusnya menjadi TNI pada agustus 1951 dan bersama tiga kompi Batalyon Bau Masepe. Ia masuk ke hutan menyusul Abdul Qahar Muzakkar. Disitu ia bergabung dengan Hamid Aly untuk memimpin TKR Latimojong.

Pada akhir tahun 1952, terjadi pemberontakan dalam pemberontakan. Usman Balo dari Batalyon Latimojong memasuki wilayah Batalyon Rante Mario dan terjadi perkelahian. Lalu Abdul Qahar Muzakkar menegur Usman Balo karena tingkah laku anak buahnya dengan tuduhan telah mengkhianati cita-cita perjuangan dengan melakukan perbuatan keji seperti memerkosa dan merampok. Mulai saat itu Hamid Aly dan Usman Balo mengirim permohonan kepada para penguasa agar bisa diterima dalam Tentara sebagai prajurit biasa. Tetapi permohonan ini ditolak. Tanggal 20 Januari 1952, Abdul Qahar

Muzakkar diangkat oleh komando tertinggi Angkatan Perang Negara Islam Indonesia sebagai Panglima Divisi IV TII. Pada saat itulah pertentangan antara Hamid Aly dan Usman Balo dengan Abdul Qahar Muzakkar mulai muncul

Sejak terpisah dari gerakan Abdul Qahhar Muzakkar, TKR kembali ke wilayah operasinya di Sidenreng Rappang, Parepare, Pinrang dan Enrekang. Aktivitas gerombolan TKR berlanjut dengan melakukan aksi di berbagai daerah. Oleh karena aktivitas mereka itulah, maka masyarakat setempat mencap mereka sebagai gerombolan. (Salihuddin, 2012)

Usman Balo dan Hamid Aly harus mempertahankan diri terhadap Tentara Republik maupun pasukan Abdul Qahhar Muzakkar, yang telah bersumpah akan memusnahkan mereka. Kemudian Usman Balo diserang dan kalah hingga terusir, lalu diapun meminta bantuan kepada bekas komandannya, Andi Selle. Akibatnya terjadilah pertempuran antara prajurit-prajurit Republik sendiri.

Segala-galanya dilakukan oleh Tentara Republik untuk memanfaatkan perpecahan ini. Dikirimnya perwira-perwira ke markas besar masing-masing saingan ini untuk memastikan tidak adanya perukunan kembali antara Abdul Qahhar Muzakkar dan Usman Balo. Konflik ini mencapai puncaknya pada Desember 1954, dengan terjadinya pertempuran selama tiga hari antara pasukan masing-masing saingan di Timur Laut Pinrang, yang dimulai 14 Desember. Di sini Abdul Qahhar Muzakkar mengarahkan kira-kira 900 prajurit yang dipimpin Syamsul Bachri. Hamid Aly yang menjadi sasaran utama harus mengarahkan seluruh kekuatannya. Kemudian, Abdul Qahhar Muzakkar berhasil menduduki markas besar TKR, Usman Balo dengan 300 gerilyawan datang membantu Hamid Aly.

Kesatuan Republik yang turut dalam gerakan Abdul Qahhar Muzakkar, memutuskan memberi bantuan kepada TKR. Ketika Januari terjadi pertempuran yang kedua antara TKR dan TII, Tentara

Republik sekali lagi membantu TKR. Tidak ada lagi pertempuran antara TKR dan Tentara Republik sejak akhir Februari 1955 dan seterusnya.

Keamanan rakyat sering terganggu adalah mereka yang berdiam di perbatasan antara kekuasaan TKR dan DI/TII hal ini disebabkan oleh karena sering terjadinya pertempuran antara pihak-pihak tersebut, dalam hal mana rakyat di tempat itu sangat sulit untuk menyesuaikan diri. Jika terjadi gangguan keamanan atau saat itu hanyalah merupakan gangguan yang dilancarkan oleh pihak DI/TII .

2. Aktivitas DI/TII di Sidrap

a. DI/TII 1950-1957

Pada akhir bulan September 1950, telah ada tanda-tanda bahwa gerombolan akan memperlihatkan aktivitasnya, dan yang menjadi sasaran utama gerombolan adalah perusakan jalanan dan jembatan, pemutusan kawat telepon dan penculikan anggota-anggota pemerintahan yang dianggap berpengaruh. Dengan siasat dan taktik diantaranya masuk kota untuk mengetahui siapa-siapa orang yang berpengaruh dalam pemerintah, untuk mengetahui bagaimana pandangan umum tentang gerakan yang diadakannya, dan mengajarkan propaganda yang mengatakan bahwa di daerah gerombolan sekarang betul-betul aman tak ada pencuri ataupun pemerkosaan. Selain itu mereka hendak memecahkan atau menanamkan anti pati antara rakyat dan tentara dengan cara merusak jembatan atau menebang pohon kayu di dekat sebuah kampung atau desa.

Adapun jembatan yang telah dirusak oleh gerombolan diantaranya jembatan Tanru Tedong, jembatan antara Rappang dan Pangkajene, jembatan di Empagae, jembatan di dekat Massepe, jembatan antara Pinrang dan Rappang juga jembatan antara Rappang dan Enrekang. Selain perusakan jembatan, kaum gerombolan juga melakukan penebangan pohon, seperti yang terjadi di Empagae, Lancirang, Massepe dan Pangkajene. Hal ini dilakukan agar tentara tidak melakukan tindakan-tindakan pada orang kampung

yang bertempat tinggal di sekitar jembatan. Dengan demikian rakyat menjadi benci dengan tentara.

Aktivitas para gerombolan benar-benar meresahkan rakyat terutama rakyat yang bertempat tinggal di desa-desa yang jauh dari kota. Tak henti-hentinya terjadi tembak menembak antara Tentara dan Gerombolan. Bukan Cuma itu, gerombolan juga menculik rakyat yang dianggap berpengaruh pada pemerintah, seperti penculikan yang terjadi di Rappang atas nama Mustari dan anggotanya M.Saleh dari Dewan Pemerintahan Daerah Rappang yang diculik pada tanggal 1 oktober 1950 oleh gerombolan antara Bulu Tinangon dan kampung Bulu Watang (Rappang) sekembalinya mereka dari memberikan penerangandi kampung Bulu Tinongan. M.Saleh dibebaskan dan kembali lagi pada malamnya tanggal 2 Oktober 1950 dini hari. Hal ini menyebabkan para pegawai pemerintahan tidak masuk dengan alasan mereka takut dicuri.

Tiga hari setelahnya tanggal 5 Oktober 1950, ada beberapa pohon kayu di pinggir jalan di Kampung Carawali di tebang oleh gerombolan, hari yang bersamaan jembatan di kampung Sereang antara Rappang dan Pangkajene di bongkar papannya oleh gerombolan. Tgl 10 Oktober, jembatan di Masekke di bongkar dan keesokan harinya, gerombolan kembali melakukan perusakan jembatan di Masekke dan beberapa pohon kayu di pinggir jalan kampung Bapangi (dekat perbatasan Sidenreng dan Soppeng) di tebang oleh gerombolan.

Di dalam proses penataan untuk mempersiapkan diri sebagai kekuatan terorganisasi di dalam melakukan pemberontakan melalui gerakan DI/TII, lahirnya pertentangan antara Abdul Qahhar Muzakkar dengan dua orang pimpinan bawahannya. Perpecahan ini rupanya terjadi akibat beberapa hal, Usman Balo dan Hamid Gali selaku pimpinan TKR di katakan menentang terjadinya hubungan dengan Darul Islam .

Hubungan Abdul Qahhar Muzakkar dengan pimpinan DI/TII Kartosuwiryo

membuat Usman Balo selaku pimpinan TKR wilayah kekuasaannya di Sidenreng Rappang merasa dikhianati, ia menyatakan mundur dari pasukan Abdul Qahhar Muzakkar. Sejak itu pada tahun 1952, pasukan Usman Balo harus menghadapi dua musuh sekaligus, pasukan Abdul Qahhar Muzakkar atau DI/TII dan TNI. Rupanya saran-saran yang selalu dilontarkan Usman Balo melalui surat lewat Sanusi Daris tidak sampai di tangan Abdul Qahhar Muzakkar. Setiap surat Usman Balo datang selalu disabot Sanusi Daris, hubungan Usman Balo dan Abdul Qahhar Muzakkar pun terputus. Dalam pengembaraannya, Usman Balo malah mendirikan Partai Pancasila. Tujuannya tak lain adalah untuk mengimbangi pengaruh yang dilancarkan DI/TII di tengah masyarakat Sidrap.

Untuk menambah jumlah pasukannya, Abdul Qahhar Muzakkar menanamkan pengaruh jahatnya kepada seluruh penduduk daerah Sidenreng Rappang agar mereka meninggalkan kediamannya dan ikut serta bersama-sama lari dan bersembunyi di hutan. Mengetahui hal ini, Usman Balo meminta kepada seluruh penduduk Sidrap agar memisahkan diri dari pasukan Kahar dan tidak memberi bantuan berupa tempat tinggal dan makanan. Apabila ada rakyat yang diketahui menolong Abdul Qahhar Mudzakkar dan pasukannya, dianggap sebagai musuh dan akan dibunuh.

Pasukan TKR pimpinan Usman Balo sering mendapatkan serangan dari pasukan DI/TII. Pada bulan desember 1953, terjadi pertempuran di Tanru Tedong. Pada pertempuran itu seluruh rumah di Larumpu habis terbakar dan rata dengan tanah. Pertempuran sengit ini pun berlanjut sampai di sungai Bulu Cenrana di Barukku Sidrap, pasukan Usman Balo mendahului pasukan Abdul Qahhar Muzakkar dengan melancarkan operasi pertamanya. Pasukan DI/TII pimpinan Abdul Qahhar Muzakkar dikerahkan dari berbagai penjuru untuk melumpuhkan pasukan Usman Balo. Kendati demikian, keperkasaan Usman

Balo diperlihatkan dalam pertempuran ini, pasukan DI/TII merasa kewalahan dan tidak mampu berbuat banyak. Padahal pertempuran sudah berlangsung selama 10 hari 10 malam.

Di hari terakhir pertempuran, jarak pasukan Usman Balo dengan pasukan Kahar Mudzakkar hanya terbatas sungai, sehingga siapa yang lengan akan menjadi korban. Jumlah korban di pihak pasukan DI/TII telah mencapai 200 orang, demikian juga di pihak Usman Balo, namun karena pasukan Usman Balo menguasai medan pertempuran, jumlah yang gugur tidak sebanyak dengan pasukan DI/TII. Pertempuran dasyat ini berlanjut bahkan sampai ke Benteng Rappang.

Memasuki tahun 1954, pasukan TKR semakin banyak dan menyebar ke seluruh wilayah dari Pare-pare hingga Enrekang. Pasukan TKR ini terdiri dari dua sektor, sektor I Latimojong dipimpin oleh Hamid Aly sedangkan sektor II Latimojong dipimpin oleh Usman Balo yang membawahi dua Batalyon yaitu Batalyon I Proklamasi yang dipimpin oleh La Ebba terdiri dari lima kompi dan Batalyon II Bambu Runcing dipimpin oleh La dale yang membawahi lima kompi. Batalyon I Proklamasi terdiri dari Mansur, Aminoto Udda, La Ponreng, Tamrin dan Abdul Rasyid Pattikang. Sedangkan Batalyon II Bambu Runcing terdiri dari Siddiq Ambo Nganro, Abidin Pido, La Parussai, Ahmad, Andi Landawi. Masing-masing kompi ini ditempatkan di seluruh wilayah Sidrap. (Salihuddin, 2012)

Distrik Pituriawa seringkali terjadi pertempuran antara TKR dengan DI/TII. Hal ini disebabkan letaknya berbatasan dengan Kabupaten Wajo sebagai daerah operasi dari gerombolan DI/TII. Melihat situasi TKR yang sering di pukul mundur oleh gerombolan DI/TII, TNI akhirnya melakukan kerja sama dengan TKR. Dengan demikian, tujuan para gerombolan TKR yang ingin menjadi pasukan TNI akhirnya dapat segera terwujudkan.

b. DI/TII 1957-1965

Setelah bergabungnya Usman Balo ke dalam Tentara Nasional pada tahun 1956, bukan berarti pasukan DI/TII tidak berupaya memasuki wilayah Sidenreng Rappang. Banyak warga yang dibunuh oleh TNI karena dicurigai menjadi anggota DI/TII. TNI memaksa mereka untuk menunjukkan dimana posisi DI/TII kalau tidak mereka akan dibunuh. Begitu pula sebaliknya, aktivitas atau kegiatan dari gerombolan TKR di wilayah Sidrap yang telah menjelama menjadi TII pada 7 Agustus 1953 hanya terbatas pada penculikan dan pembunuhan orang-orang yang dianggap aktif dalam pemerintah.

Pada setiap kesempatan, mereka masih tetap berusaha untuk menyerang dan menduduki wilayah Sidenreng Rappang yang dekat dengan perbatasan Wajo. Tanggal 1 Agustus 1960, pasukan DI/TII melakukan serangan besar-besaran di wilayah Tanru Tedong. Pasukan khusus DI/TII yaitu *Momoc Ansharullah* dengan kekuatan hingga ribuan personil menyerbu wilayah Tanru Tedong dengan cara merusak jembatan yang menghubungkan wilayah Kalosi dengan kota Tanru Tedong. Pada serangan malam pertama, banyak korban berjatuh dan rumah-rumah warga di bakar. Pasukan TNI merasa kewalahan, dan meminta bantuan di Makassar. Untuk mengatasi serangan selanjutnya, pasukan TNI memasang "*senjata mematikan*" dengan cara memasang aliran listrik bertegangan tinggi di sepanjang sungai Bila yang dipastikan akan dilalui oleh anggota DI/TII. Karena serangan dari pasukan TNI, ratusan anggota pasukan Momoc Ansharullah tewas terkena aliran listrik dan dibiarkan hanyut terbawa arus di sepanjang sungai Bila. Setelah bantuan tiap di Tanru Tedong, pasukan DI/TII akhirnya bisa dipukul mundur sampai akhirnya mereka kembali masuk hutan. (Salihuddin, 2012)

Sekitar tahun 1961, Abdul Qahhar Muzakkar telah menjadi lemah tidak hanya karena adanya perpecahan intern di dalam tubuh DI/TII, tetapi juga karena banyak berkurangnya rakyat akibat kebijakan perusakan DI yang semakin meningkat,

dimulai dengan kampanye bumi hangus tahun 1956. Selanjutnya situasi di Sulawesi Selatan telah berubah dalam waktu sepuluh tahun sejak Abdul Qahhar Muzakkar masuk hutan untuk pertama kali. Sekarang daerah itu sebagaimana dituntut oleh Abdul Qahhar Muzakkar tahun 1950 dan 1951 ada di tangan anak daerah yang mengenal lapangan dan penduduk setempat yang dimulai oleh Jusuf.

Diputuskan pada tahun 1963 bahwa diperlukan pasukan tambahan untuk mengakhiri pemberontakan. Tanggal 28 Oktober 1963, tiga batalyon dari divisi Siliwangi (Jawa Barat) mendarat di Parepare dan pada tanggal 26 Februari 1964, satu Batalyon Kujang menggabungkan diri dengan mereka. Sekitar akhir 1964, pasukan Siliwangi berhasil memburu Abdul Qahhar Muzakkar dan sisa-sisa DI/TII sampai memasuki Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 3 Februari 1965, Abdul Qahhar Muzakkar tertembak dan mati. Jasadnya dikirim kembali ke Makassar dengan Helikopter, dan kuburannya tidak pernah diungkapkan. (Barbara Sillars Harvey, 1989)

3. Dampak Gerakan DI/TII Di Sidrap

a. Dampak Sosial

Umumnya rakyat bingung oleh adanya aktivitas gerombolan dan gerakan keamanan yang dilakukan oleh Tentara. Banyak dari mereka yang mengungsi meninggalkan desanya. Yang menyebabkan mereka itu mengungsi diantaranya takut kesasar, tak tahan oleh pemungutan sogongan dari gerombolan. Takut tindakan gerombolan atau Tentara atas dirinya bilamana ada jembatan atau pohon yang rusak atau rebah dekat kampongnya. Sehingga mereka dilarang singkirkan pohon oleh Gerombolan atau disuruh singkirkan oleh Tentara. Keadaanya serba salah. Pendeknya rakyat atau penduduk terjepit. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan terjadinya serangan dari pihak DI/TII dan TNI, apabila terdengar seruan "*monini bareng'e*" membuat masyarakat akan segera melarikan diri dan

bersembunyi ke dalam lubang sedalam satu meter di dalam tanah.

Untuk menghindari kekacauan, masyarakat akan mengungsi ke daerah yang di anggap aman, terkadang pula mereka yang mengungsi memilih menetap karena menganggap wilayah tempat tinggalnya sudah tidak aman lagi dan tidak dapat ditempati lagi. Para pengungsi yang tinggal menetap ini menyebabkan pertumbuhan jumlah penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk dengan kata lain dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan wilayah Sidrap terutama dalam bidang perekonomian.

b. Dampak Ekonomi

Sejak tahun 1958, wilayah Sidrap perlahan mulai dikuasai oleh TNI. Meski sepenuhnya ada di bawah kekuasaan TNI, kekacauan yang terjadi menghambat aktivitas perekonomian dan kehidupan masyarakat sangat memprihatinkan. Keberadaan TNI justru malah mempersulit keadaan, rakyat semakin dilemma antara mengikuti TNI atau gerombolan.

Sebagai wilayah yang berada di dalam operasi gerombolan TKR, rakyat yang berprofesi sebagai petani dapat menyesuaikan diri terhadap TKR dan mereka akan dianggap sebagai anggota atau kawan. Sedangkan bagi TNI mereka adalah petani. Hal ini dapat dikatakan bahwa 80% anggota TKR adalah petani. Tidak cukup sampai disitu saja, meningkatnya hasil pertanian selama beberapa tahun di daerah Sidrap membuat anggota TKR ingin membangun kembali pengairan di Bulucendrana yang terbenkakai, dimana dalam beberapa tahun pernah diusahakan oleh pemerintah, namun karena tekanan oleh pihak gerombolan DI/TII usaha tersebut kendor.

Untuk mencapai hal tersebut, terjalin kerja sama dan gotong royong yang dilakukan oleh rakyat dan juga TKR. Dengan demikian, pengairan tersebut dapat mengairi beribu-ribu Ha sawah di daerah Pituriawa dan Pituriase. Hal ini menyebabkan usaha pertanian dan persawahan dilakukan dengan aman. Di

lain pihak, gerombolan DI/TII mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan bahan-bahan makanan para anggotanya. Untuk memenuhi kebutuhan pokok para anggotanya, pada malam hari para gerombolan akan menyelip masuk ke dalam daerah perkambungan untuk mengambil bahan-bahan keperluan mereka di hutan seperti beras dan hewan ternak rakyat. Karena hal ini Usman Balo mencap para gerombolan DI/TII sebagai perampok.

Untuk membiayai gerakannya, para gerombolan DI/TII juga melakukan penarikan dana dari warga secara paksa. Bagi para petani, mereka dikenakan pajak keamanan, bahkan untuk mengelola lahan dan memanen hasil pertaniannya mereka harus membayar apa yang seharusnya tidak mereka lakukan. Pemberian pajak ini dikenal dengan istilah "*maccukke*". Para petani harus membayar pajak kepada anggota DI/TII karena para gerombolan menganggap dirinya adalah pemerintah. Pembayaran pajak ini biasanya berupa hasil panen padi atau jagung, namun juga biasa berupa uang. Hasil panen ini biasanya akan diberikan kepada gerombolan DI/TII sebanyak 10%.

c. Dampak Agama

Aktivitas gerombolan yang ingin menjadikan syariat islam sebagai dasar gerakannya, menghadapkan kelompok Tolotang berada pada situasi yang sulit. Karena keadaan yang sudah begitu kacau, kelompok Tolotang terpaksa harus mengikuti apa yang dilakukan oleh warga yang beragama islam. Seperti ke masjid untuk melaksanakan shalat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berbaur dengan masyarakat yang beragama islam. Apabila mereka tidak melaksanakan shalat dengan kata lain terlihat melaksanakan ibadah sesuai syariat islam, para gerombolan tak segan untuk memaksa mereka keluar dari keyakinan mereka. Tidak sedikit dari mereka yang mati dibunuh. Seperti yang pernah terjadi pada tanggal 3 Januari 1961, para gerombolan DI/TII melakukan pembunuhan terhadap masyarakat

Tolotang sebanyak 6 orang. Penganiayaan ini terjadi ketika mereka hendak pergi mengumpulkan harta bendanya yang ditinggalkan sebelum pergi mengungsi. Keenam orang ini dipukuli sampai ada yang ditusuk perutnya dengan tombak.

Kelompok Tolotang sering menjadi sasaran tembak para gerombolan. Suatu ketika orang-orang Tolotang di desa Oting dibantai sehingga sebagian di antaranya lari ke Amparita (Nasaruddin Umar, 2015) dan Tanru Tedong. Di daerah ini komunitas Tolotang bergabung dengan TNI melalui pasukan Sukarela demi memberantas DI/TII. Semenjak saat itu komunitas Tolotang semakin berhadapan dengan umat Islam.

Bukan hanya sekedar penganut kepercayaan Tolotang saja yang harus berhadapan dengan gerombolan, masyarakat beragama Islam pun menghadapi kesulitan dan ketakutan yang disebabkan oleh pengepungan terhadap tempat ibadah, sama seperti yang pernah terjadi di Simpo, ketika orang-orang baru saja selesai melakukan ibadah tarwih, para gerombolan melakukan pengepungan dan melakukan penculikan. Hal ini yang menyebabkan masyarakat menjadi takut untuk datang beribadah ke musallah atau masjid, di lain pihak mereka juga takut kepada gerombolan apabila tidak melaksanakan kewajiban

d. Dampak Pendidikan

Pada periode berlangsungnya gerakan DI/TII di Sidrap masih dapat dikatakan sebagian besar penduduknya berada dalam keadaan buta huruf terutama huruf latin. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya gerombolan yang masih buta huruf latin atau bahasa Melayu. Mereka yang pada umumnya tidak berpendidikan dan buta huruf tentu saja memberikan keuntungan dan kerugian bagi kedua belah pihak. Masyarakat tidak berpendidikan ini dapat memberikan dukungan kepada salah satu pihak dengan hanya berdasarkan perasaan emosional dan bukan oleh pikiran jernih.

Mungkin juga hanya karena rasa takut. (Anhar Gonggong, 2004)

Akibat aktivitas gerombolan DI/TII yang selalu melakukan serangan-serangan ke daerah pengunungan Sisrap yang berbatasan dengan Wajo, mengakibatkan sejumlah sekolah rakyat yang berada di daerah timur Pituriawa dan Pituriase akhirnya ditutup. Rumah-rumah sekolah rakyat yang tadinya tertutup karena tekanan keadaan akhirnya dibangun kembali oleh TKR. Bahkan beberapa desa di daerah pengunungan di bangun rumah sekolah darurat dan juga gurunya langsung digaji oleh pimpinan TKR itu sendiri. Disini dapat dilihat bahwa usaha tidak hanya dilakukan dalam lapangan saja tetapi juga dalam pendidikan.

E. Kesimpulan

Salah satu daerah yang menjadi basis gerakan gerombolan DI/TII adalah Sidenreng Rappang (Sidrap) dimana posisi letaknya berbatasan dengan Kabupaten Wajo yang pada waktu itu adalah daerah operasi DI/TII. Sidrap merupakan daerah operasi dari TKR, itulah mengapa hampir setiap hari sering terjadi pertempuran antara TKR dan DI/TII karena kedua belah pihak ingin menguasai daerah Sidrap.

Kondisi daerah Sidrap yang memenuhi syarat-syarat geologi dan klimatologi untuk digarap sebagai daerah persawahan dan perladangan, dimana padi dan jagung merupakan hasil sawah dan ladang yang paling utama. Keadaan ini dimanfaatkan oleh TNI dengan monopolinya yang mengendalikan perekonomian di daerah tersebut. Gerakan yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negaranya menyebabkan Komunitas Adat Tolotang berada di ambang kekhawatiran. Rasa takut yang begitu besar membuat masyarakat yang menjadi penganut Tolotang juga melaksanakan ibadah yang berbeda dengan tradisinya. Hal ini dikarenakan, apabila mereka tidak melaksanakan kewajiban layaknya orang Islam, para gerombolan DI/TII tak segan-segan membunuhnya.

Munculnya pemberontakan di Sidrap merupakan akibat dari kekecewaan para bekas pejuang kemerdekaan yang ingin dibentuk menjadi satu kesatuan dalam Tentara Nasional Indonesia. Para gerombolan melakukan aksi teror seperti pemerasan, pembunuhan, penculikan, penebangan pohon dan perusakan jembatan terjadi di berbagai wilayah di Sidrap. Gerakan DI/TII mulai muncul ketika Hamid Aly dan Usman Balo terpisah dari gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Abdul Qahhar Muzakkar sedangkan Pasukan Hamid Aly dan Usman Balo bergabung dalam TKR. Pihak TNI kini harus berhadapan dengan dua lawan sekaligus. Aktivitas gerombolan DI/TII selama kurun waktu 15 tahun membuat masyarakat Sidrap berada di bawah tekanan gerombolan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, A dan Nukma, U., 2006. *Perpesktif Sidrap dalam Bingkai Pers*, Makassar, Pelita Pustaka.
- Latief, Y., 2006, *Selayang Pandang Sidenreng Rappang. Sidrap*. Bappeda Kab. Sidrap Kerjasama Yayasan Lentera
- Alfiansyah., M, Tang dan Safriadi., 2018, Perilaku Politik Towani Tolotang di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang, *Jurnal Etnografi Indonesia* 3(2), pp 184-199
- Salihuddin, 2012, Gerakan Gerombolan dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat Tanru Tedong (1953-1960), *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makassar
- Arsip Nasional Republik Indonesia Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip (Rahasia) Propinsi Sulawesi 1946-1960*, Volume IX Nomor 1 Tahun 1995/1996, Makassar
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah. 2003. *Inventaris Arsip Sidenreng Rappang (Sidrap) 1950-1978*, Makassar
- Gonggong, A., 2004. *Abdul Qahhar Mudzakkar Dari Patriot Hingga Pemabrontak*. Cetakan Kedua, Ombak, Yogyakarta.
- Harvey, B, S., 1989. *Pemberontakan Kahar Mudzakkar dari Tradisi ke DI/TII*. Cetakan Pertama, Jakarta. Pustaka Utama Grafiti
- Dijk, C, V. 1983. *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta. Grafiti Pers
- Madjid, M,S., dan Hamid, A, R., 2008. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Makassar. Rayhan Multimedia
- Hamid, A,R dan Muhammad, S,M., 2015. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta. Ombak
- Abdurrahman, D., 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta. Logos Wacana Ilmu
- Kuntowijoyo. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta. PT. Benteng Pustaka
- Hamid, A,R. 2008. *Qahhar Mudzakkarr di Persimpangan Jalan*. Makassar. Pustaka Refleksi
- Umar, N., 2015, Agama Tolotang di Sidrap, Inilahcom, 29 April 2019, [https://m.inilah.com/news/details/2205333?agama-tolotang-di-sidrap]
- Hanisa, H.I., 2019. Hubungan Kahar Mudzakkar dengan Usman Balo. [Interview] (23 April 2019)
- Ca, H., 2019. *Dampak DI/TII di Sidrap*. [Interview] (29 April 2019)
- Ca, H., 2019. *Aktivitas dari Gerombolan DI/TII di Sidrap*. [Interview] (29 April 2019)